EXERO: Journal of Research in Business and Economics
Vol 6, No 2, November 2023, Hal. 104-122
ISSN (e): 2655-1519, ISSN (p): 2655-1527
Journal homepage: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/exero

Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dimediasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Tahun 2011-2020

Kristina Fitasari[1]
[1]Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Sragen
kristinafitasari@gmail.com

DOI: https://dx.doi.org/10.24071/exero.v6i2.5492

Abstrak

Kemiskinan adalah masalah negara maju maupun berkembang. Kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Selain itu faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah indeks pembangunan manusia yang disebut desentralisasi fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan alokasi belanja, desentralisasi fiskal, serta kinerja keuangan modal di daerah Kabupaten Sragen terhadap kemiskinan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan melalui kuesioner. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif signifikan pada alokasi belanja modal kabupaten sragen, adanya hubungan yang positif signifikan pada Desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, dan tidak adanya hubungan atau negatif tidak signifikan pada indeks pembangunan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: alokasi belanja, desentralisasi fiskal, kemiskinan, keuangan daerah, indeks pembangunan manusia

Abstract

Poverty is a problem for both developed and developing countries. Poverty is determined by the level of income and the ability of a country to meet its most basic needs. In addition, the factor that affects poverty is the human development index called fiscal decentralization. This study aims to describe the allocation of expenditures, fiscal decentralization, and financial performance of capital in the Sragen Regency to poverty. The research method in this study is descriptive quantitative, collecting information to test hypotheses or answer questions through questionnaires. The results obtained in this study showed a significant positive relationship between the allocation of capital expenditure in the Sragen district, a significant positive relationship between fiscal decentralization on poverty, and no significant or negative relationship between the development index on poverty.

Keywords: expenditure allocation, fiscal decentralization, poverty, regional finance, human development index

Pendahuluan

Baik negara maju maupun negara berkembang, berjuang melawan kemiskinan, tetapi masalah yang lebih umum di negara-negara yang maju sebab fakta bahwa situasi perluasan mereka sedang tidak konsisten serta juga tidak berkelanjutan (Tawiah, Zakari, & Adedoyin, 2021). Secara umum, kemiskinan ditentukan oleh

tingkat pendapatan dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar (Dhrifi, Alnahdi, & Jaziri, 2021). Sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi di berbagai bidang keahlian diperlukan dalam rangka pembangunan nasional (Septin, 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dimanfaatkan untuk mengkategorikan negara sebagai maju, berkembang, atau terbelakang serta untuk menilai dampak kebijakan ekonomi pada standar hidup (Ali, Frynas, & Mahmood, 2017). Akibatnya, kita memerlukan standar untuk mengukur tingkat perkembangan manusia, standar inilah yang mendorong teori Indeks Pembangunan Manusia (1990) United Nation Development Programme, yang berfungsi sebagai standar untuk pembangunan manusia tingkat tinggi maupun rendah (Sabir, Rafique, & Abbas, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen terus meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut masih berkembang (Resce, 2021). Menurut kriteria UNDP, status pembangunan manusia Sragen ialah "tinggi" pada tahun 2020, ketika IPM untuk kabupaten yaitu 73,95. Antara tahun 2011 dan 2020, IPM Kabupaten Sragen meningkat rata-rata 0,95% per tahun. Komponen IPM juga mengalami pertumbuhan dari tahun 2011 hingga 2020 (Leon-Castro, Blanco-Mesa, Romero-Serrano, & Velázquez-Cazares, 2021). Kemungkinan bayi baru lahir untuk hidup sampai usia 75,71 tahun telah meningkat 0,58 tahun dari tahun 2011 (Yumashev, Ślusarczyk, Kondrashev, & Mikhaylov, 2020). Anak-anak berusia 7 tahun mempunyai 12,83 tahun sekolah yang tersedia bagi mereka, meningkat 1,62 tahun dari tahun 2011. Sedangkan, tingkat pendidikan rata-rata orang berusia 25 tahun ke atas yaitu 7,65 tahun, naik 1,39 tahun dari tahun sebelumnya. Belanja per kapita masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp 2,08 juta selama tahun 2011 menjadi Rp 12,59 juta pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2019).

Kemiskinan dari satu pada beberapa variabel yang berdampak pada indeks pembangunan manusia ialah distribusi modal (Frankenhuis & Nettle, 2020). Proses pengalokasian sumber daya keuangan dikenal sebagai alokasi modal. (Satria, 2021) Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 yang mengatur terkait dana perimbangan, dana alokasi umum dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan memanfaatkan model yang meninjau potensi daerah, kebutuhan fiskal, serta

keperluan belanja pegawai (Hairiyah, Malisan, & Fakhroni, 2018). Sesuai dengan temuan penelitian Mulyati & Yusriadi, (2017), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemerintah daerah lebih produktif ketika mereka mengalokasikan persentase yang lebih tinggi dari anggaran mereka untuk proyek-proyek modal (Rochmatullah, Hartanto, & Arifin, 2016). Akibatnya, dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal terkait dengan pelayanan publik, artinya jumlah belanja modal yang dialokasikan setiap tahun harus cukup besar (Saud, Asterina, & Trisha, 2020). Tingkat pelayanan pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat dapat dianggap meningkat seiring dengan meningkatnya alokasi belanja modal, dan sebaliknya (Hasanuddin, Elpisah, & Muslim, 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemiskinan pada indeks pembangunan manusia adalah desentralisasi fiskal (Kwabena Obeng, 2021). Satu dari beberapa jenis serta elemen kunci dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal (Nursini & Tawakkal, 2019). Pemerintah daerah harus didukung jika mereka ingin melaksanakan kewajibannya secara efektif serta memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana memberikan layanan di sektor publik, mereka harus memiliki akses ke sumber keuangan yang sesuai, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, serta uang perimbangan dari pusat pengalihan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah, termasuk pendapatan serta pengeluaran, dalam rangka meningkatkan perekonomian dikenal sebagai desentralisasi fiskal, atau kebijakan fiscal (Digdowiseiso, Sugiyanto, & Setiawan, 2020).

Indeks pembangunan manusia memperhitungkan kinerja keuangan ketika menentukan berapa banyak kemiskinan yang ada. Kinerja keuangan adalah metrik untuk manajemen keuangan organisasi yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban (Azzaki, 2021). Tingkat keberhasilan suatu proyek di bidang keuangan daerah yang melibatkan pendapatan serta belanja daerah dengan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan untuk 1 periode anggaran disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardian, Yulmardi, & Bhakti, 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilangsungkan oleh Sutiono & Syafitri (2018) mengklaim bahwa distribusi belanja modal dalam APBD dipengaruhi secara positif

tetapi tidak signifikan. Menurut penelitian Hayati & Achsa (2017), desentralisasi fiskal di kabupaten dan kota di Kalimantan berdampak kecil namun bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan desentralisasi fiskal di kota tersebut belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan pada indeks pembangunan manusia. Menurut penelitian sebelumnya oleh Suartini, (2020), penurunan tingkat kemiskinan di daerah tidak terlalu dipengaruhi berdasarkan parameter hasil keuangan daerah di beberapa kabupaten serta kota Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikatakan sebagian disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelidiki kemungkinan komersial dari masing-masing daerah. Berikut update penelitian tersebut berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan system quality serta mediasi dari variable competitive advantage. Gambaran dampak alokasi belanja, desentralisasi fiskal, serta kinerja keuangan modal inilah yang ingin dilakukan oleh penelitian ini yang ada di daerah Kabupaten Sragen terhadap kemiskinan dimediasi indeks pembangunan manusia sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sragen. Maka judul dari penelitian ini yaitu "Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Dimediasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Tahun 2011-2020".

Kajian Literatur

Alokasi belanja modal

Menurut Halim (2008:101), pengeluaran modal didefinisikan sebagai pembelian aset tetap serta aset lainnya yang dianggarkan untuk keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun perlu dibeli, diperoleh, atau dikembangkan agar dapat digunakan untuk fungsi pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, maupun aset tetap lainnya. Belanja modal juga mencakup

pembangunan jalan, sistem irigasi, serta aset tetap lainnya. Pengadaan tanah, gedung, mesin, prasarana, dan aset tetap lainnya untuk kegiatan masyarakat merupakan tujuan alokasi belanja modal (Permendagri No. 13, 2006).

Di Kabupaten Sragen, Sesuai dengan amanat undang-undang terkait yang berlaku, sebuah peraturan daerah mengatur bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan (Kinasih, 2013). Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 ialah satu diantaranya, serta mengatur bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sragen tahun 2019 akan berjumlah Rp2.141.194.857.000,00 dengan belanja daerah (defisit) mencapai Rp2.146.652.895.644,00. Selain itu, untuk pembiayaan daerah, penerimaan sebesar Rp105.458.038.644,00 dengan pengeluaran mencapai Rp100.000.000.000,00; sehingga sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah Rp0,00. Anggaran tersebut digunakan untuk dua kategori, yakni (1) Pengeluaran tidak langsung, seperti biaya pegawai, biaya bunga, biaya hibah, biaya dukungan keuangan untuk pemerintah provinsi/kabupaten dan desa, biaya bantuan sosial, biaya bagi hasil untuk entitas tersebut, dan (2) Biaya langsung, seperti biaya personel, biaya barang maupun jasa, serta biaya modal. Berdasarkan penelitian Huda et al. (2015), indikator untuk menghitung variabel alokasi belanja modal yaitu sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ x } 100\ \%$$

Desentralisasi fiscal

Desentralisasi fiskal adalah proses pemindahan dana anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hingga tingkat yang lebih rendah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik sesuai dengan berbagai kewenangan yang diberikan terhadap sektor pemerintahan yang didelegasikan. Gagasan bahwa uang harus mengikuti fungsi ialah satu dari beberapa gagasan yang harus diperhitungkan serta dipraktekkan ketika membangun desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, setiap transfer atau pendelegasian kekuasaan di dalam pemerintahan berdampak pada uang yang dibutuhkan untuk menjalankan kekuasaan itu. Kebijakan otonomi daerah adalah turunan dari kebijakan perimbangan keuangan pusat maupun daerah. Hal ini menyiratkan bahwa

kecenderungan biaya yang dituntut oleh daerah untuk meningkat semakin besar dengan semakin banyaknya kewenangan yang dialihkan. Kapasitas fiskal memiliki range angka indeks sebesar x<0<ẋ dengan klasifikasi antara lain (1) ≥ 2 termasuk sangat tinggi, (2) 1 ≤ x < 2 termasuk tinggi, (3) 0.5 ≤ x < 1 termasuk sedang, dan (4) < 0.5 termasuk rendah. Adapun indikator pengukuran variabel desentralisasi fiskal adalah seperti di bawah ini:

$$\text{Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \text{ x } 100\ \%$$

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah metrik untuk manajemen keuangan organisasi yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja sebagai keluaran atau hasil kegiatan atau program yang akan atau telah dilaksanakan serta diperoleh sehubungan dengan pemanfaatan anggaran dengan kuantitas maupun kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan "indikasi tingkat pendapatan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan" dalam rangka memenuhi maksud, tujuan, visi, serta tujuan pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 25).

Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur untuk satu periode anggaran dengan memanfaatkan sistem keuangan yang ditentukan dengan kebijakan ataupun ketetapan perundang-undangan sesuai dengan Sari (2016), ialah derajat pencapaian suatu pekerjaan di bidang keuangan daerah. Indeks kinerja keuangan daerah sendiri memiliki range angka indeks dari 0%-100% dengan klasifikasi angka indeksnya berupa (1) 0%-33% termasuk rendah, (2) 33%-42% termasuk sedang, dan (3) 43%-100% termasuk tinggi. Metrik kinerja yang memanfaatkan indikator keuangan ialah kinerja keuangan daerah. Metrik seperti rasio pertumbuhan PAD, rasio penyelarasan alokasi dana, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, serta rasio efisiensi keuangan daerah dipakai dalam studi ini.

Rasio Pertumbuhan PAD, yang ditentukan dengan mengurangkan total penerimaan PAD tahun sebelumnya dari total penerimaan PAD tahun berjalan, menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu mempertahankan dan

menumbuhkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Rasio pertumbuhan membantu mengidentifikasi peluang geografis yang memerlukan perhatian. Pertumbuhan positif ditunjukkan oleh Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, serta Belanja Modal yang lebih besar, disertai dengan Belanja Operasional yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang berkaitan telah mampu dipertahankan serta mempercepat pemekarannya sepanjang waktu. Pertumbuhan negatif jika TPD, PAD, maupun belanja operasional yang lebih besar diikuti oleh belanja modal yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum berhasil mengakselerasi pertumbuhan daerah. Adapun pertumbuhan PAD dapat dirumuskan sebagi berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{Pn - P0}{P0} \text{ x } 100\ \% \qquad (3)$$

Keterangan:
Pn = Realisasi Penerimaan PAD Tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya
P0 = Realisasi PAD sebelumnya

Rasio kompatibilitas menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan mereka dengan cara yang diprioritaskan untuk belanja terbaik. Karena bagaimana operasi pembangunan bersifat dinamis dan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan direncanakan sangat mempengaruhi rasio ini, tidak ada patokan yang jelas untuk rasio yang sesuai antara belanja operasional dan belanja modal terhadap APBD. Pemerintah daerah masih memainkan peran yang cukup besar dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah negara berkembang ini (Stryabkova, Vladyka, Lyshchikova, Rzayev, & Kochergin, 2021). Oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan daerah, perlu menaikkan rasio belanja modal (pembangunan) yang cukup rendah. Dengan mengevaluasi rasio belanja langsung terhadap belanja daerah secara keseluruhan, rasio kesesuaian dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ x } 100\ \%$$

Rasio kemandirian membuktikan kemampuan daerah untuk menanggung operasi pemerintahannya sendiri, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan data

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 690.900.327 Tahun 1996, antara lain (1) 0%-25% termasuk sangat rendah/instruktif, (2) 25%-50% termasuk rendah/konsultatif, (3) 50% - 75% termasuk moderat/partisipatif, serta (4) 75% - 100% termasuk tinggi/delegatif. Rumus untuk menghitung rasio ini ialah total pendapatan PAD dibagi total pendapatan transfer, atau sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \text{ x } 100\ \%$$

Rasio efektivitas PAD menilai seberapa baik kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan atau dialokasikan untuk mencapai PAD tersebut. Rasio efektivitas ditentukan dengan menyamakan realisasi penerimaan PAD dengan proyeksi penerimaan PAD. Rasio efektivitas PAD harus memenuhi kriteria antara lain: (1) apabila nilainya kurang dari 100% (x 100%), tidak efektif, (2) ketika nilainya sama dengan 100% (x=100%), menunjukkan bahwa efektivitasnya seimbang, dan (3) jika nilainya lebih dari 100% (x>100%), menunjukkan bahwa efektivitas. Rumus rasio efektivitas ialah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\ \%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah memadukan realisasi belanja dan belanja daerah terhadap APBD (Mahmudi, 2007). Jika rasio yang diperoleh kurang dari 100%, kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan uang tergolong efisien. Semakin efisien rasio ini, semakin efektif pemerintah menjadi, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Efesiensi KeuDa} = \frac{\textit{Realisasi Belanja Daerah}}{\textit{Realisasi Penerimaan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Kemiskinan

Seseorang, keluarga, masyarakat, atau bahkan seluruh bangsa dapat dibatasi oleh kemiskinan, yang menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, ancaman penegakan hukum dan keadilan, ancaman posisi tawar (bargaining position) dalam hubungan internasional, kematian generasi, dan masa depan suram bangsa dan negara. Definisi ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kemiskinan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hidup dalam kemiskinan biasanya tidak nyaman, yang berarti bahwa orang miskin hidup dalam ketidaknyamanan yang terus-menerus. Karena mereka tidak dapat membandingkan

situasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka selalu berada di pinggiran dalam semua profesi (Esmara, 1988). Indikator pengukuran variabel tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \text{ x } 100\ \%$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didasarkan pada berbagai aspek fundamental kualitas hidup, menilai sejauh mana pembangunan manusia telah dicapai (Daud & Soleman, 2020). IPM dibangun menggunakan metode tiga dimensi mendasar sebagai pengukur kualitas hidup. Kehidupan yang layak, pengetahuan, dan umur panjang yaitu beberapa dari dimensi ini. Karena hubungannya dengan berbagai keadaan, ada pemahaman besar dari ketiga aspek ini (Juned & Yusra, 2021). Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan harapan hidup saat lahir. Selain itu, campuran metrik untuk tingkat huruf dan jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Dalam menentukan parameter kehidupan yang layak, indikator daya beli masyarakat digunakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata jumlah pengeluaran per kapita sebagai strategi pendapatan yang menunjukkan capaian pembangunan untuk kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia memiliki range angka indeks antara 0-100 dengan klasifikasi antara lain (1) <50 termasuk rendah, (2) 50-60 termasuk menengah bawah, (3) 66-79 termasuk menengah atas, dan >80 termasuk tinggi. Rumus dari IPM yang diambil dari BPS dengan metode baru yaitu:

$$\text{Dimensi Kesehatan} = \frac{AHH - AHH\,min}{AHH\,maks - AHH\,min}$$

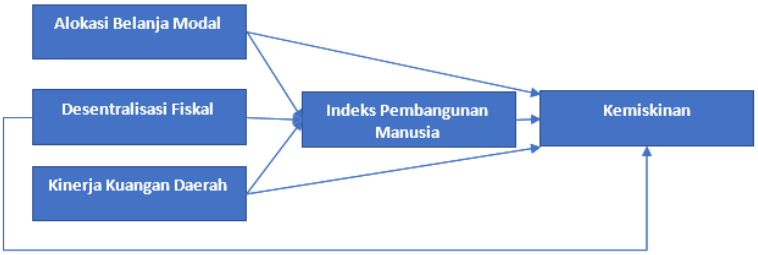
$$\text{Dimensi Pendidikan} = \frac{IHLS + IRL}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran} = \frac{in(pendapatan) - in(pendapatan\ min)}{in(pendapatan\ maks) - in(pendapatan\ min)}$$

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan\ x\ IPendidikan\ x\ IPengeluaran}$$

Dimana:
AHH: Angka Harapan Hidup
IHLS: Indeks Harapan Lama Sekolah
RLS: Indeks Rata – Rata Lama Sekolah
In: Indeks pendapatan

Kerangka Teori



Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam sub kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan Firdaus (2019) metodologi penelitian pada hakikatnya adalah ciri-ciri ilmiah yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam mencapai tujuan tertentu. pendekatan yang diadopsi dalam strategi kuantitatif. Penelitian deskriptif, menggunakan observasi mengenai keadaan subjek yang diteliti saat ini. Kami mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan melalui kuesioner dan cara lain. Peneliti akan merinci apa yang sebenarnya terjadi mengenai situasi yang diteliti melalui penyelidikan deskriptif ini.

Berdasarkan sensus, analisis ini mengkaji data runtun waktu sekunder untuk Kabupaten Sragen dari tahun 2011 hingga 2020. Data tersebut disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan organisasi lainnya. Dalam studi ini, regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data dengan memakai aplikasi SPSS versi 26.

Hasil Dan Pembahasan

Asumsi klasik

Normalitas

Tabel 1. Tabel Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		MODEL 1	MODEL 2
N		10	10
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	.33124840	.65123667
Most Extreme Differences	Absolute	.151	.209
	Positive	.151	.189
	Negative	-.122	-.209
Test Statistic		.151	.209
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]	.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahi bahawa model 1 yang terdiri dari hubungan antara Alokasi Belanja Modal, desentralisasi fiskal, Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan berdistribusi normal. Pada model ke 2 yang terdiri dari hubungan antara Alokasi Belanja Modal, desentralisasi fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah Manusia terhadap Kemiskinan.

Multikolinieritas

Model tidak mengandung multikolinearitas, sesuai dengan hasil evaluasi asumsi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan matriks korelasi antara variabel independen.

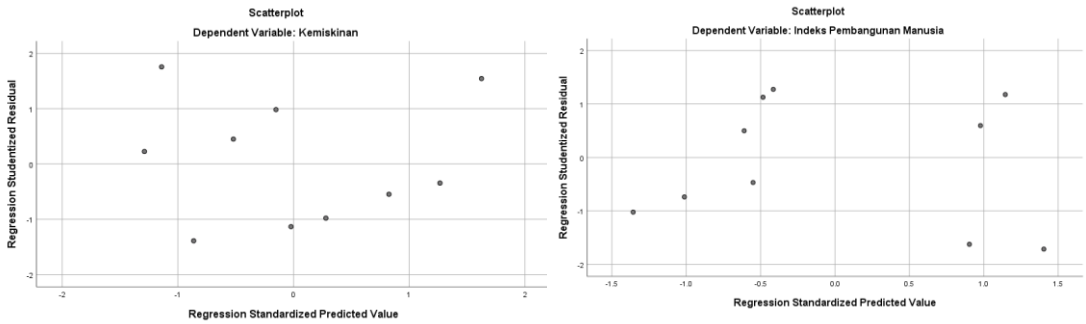
Tabel 2. Tabel Multikolinearitas

	Model 1		Model 2	
Model	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
(Constant)				
alokasi belanja modal	.845	4.089	.323	3.095
desentralisasi fiskal	.959	6.816	.299	3.346
Kinerja Kuangan Daerah	.963	3.375	.865	1.156
Indeks Pembangunan Manusia	.911	8.864		

Anda dapat mengamati pengujian multikolinearitas dengan memeriksa nilai toleransi dan VIF yang diperoleh. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi dan nilai VIF yaitu 1. Berdasarkan hasil pengujian, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai total VIF pada variabel alokasi belanja modal, desentralisasi fiskal, baik posisi keuangan daerah serta indeks pembangunan manusia sama dengan 1 untuk kedua model 1 dan 2.

Uji heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk memastikan apakah ada ketidakseimbangan varians antara residual pengamatan yang berbeda di dalam model regresi (Prena & Muliyawan, 2020). Dengan melihat grafik plot antara nilai proyeksi variabel dependen, ZPRED, dan residual SRESID, dapat ditentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola lain dan titik-titik berjarak merata di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y.



Model 1 Model 2

Gambar 1. Titik sebar nilai sumbu Y

Seperti terlihat pada gambar di atas, titik-titik tersebar di atas dan di bawah nilai sumbu Y angka 0, maka tidak ada pola yang terlihat. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian bersifat homoskedastis.

Auto korelasi

Dalam model regresi linier, uji asumsi autokorelasi mencari keterkaitan antara confounding error pada periode t serta confounding error pada periode t-1. Untuk memastikan apakah ada autokorelasi dalam model regresi, uji Durbin-Watson (uji Dw) dievaluasi

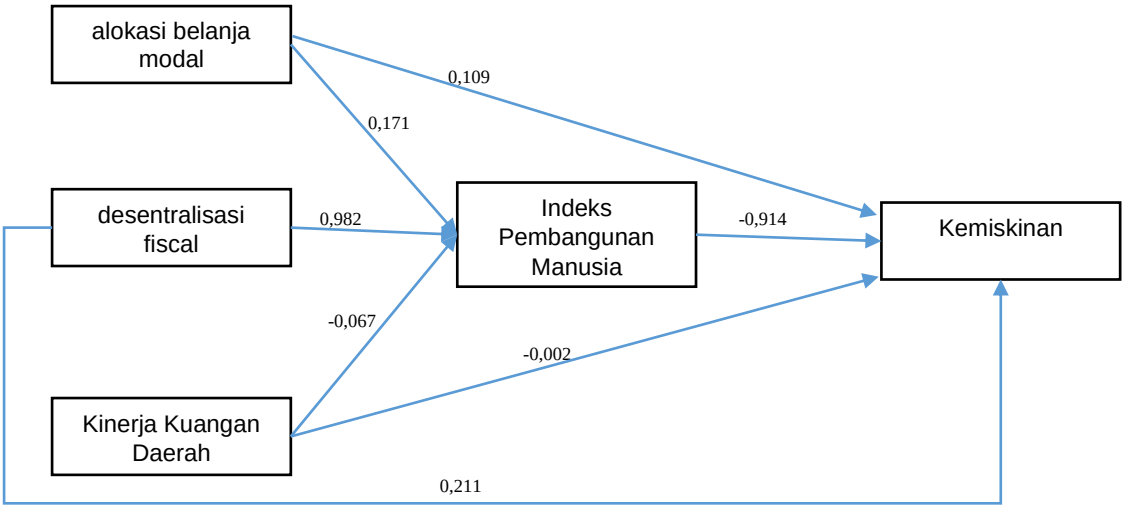
Tabel 3. Nilai Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	2.002
2	2.175

Nilai DW (Durbin Watson) pada model 1 mempunyai nilai 2,002, serta model 2 mempunyai nilai 1,175, sesuai dengan hasil yang disebutkan di atas. Mengingat terdapat N = 10 titik data dan 1 K = 4 variabel bebas, selanjutnya kita akan membandingkan nilai tersebut dengan nilai tabel DW dengan taraf signifikansi 5%. Dalam hal ini, nilai du (batas atas) yaitu 2.4137. Nilai DW 2,002 lebih kecil dari (4 - du) 4 - 2,4137 = 1,5863, dan nilai DW 2002 melebihi batas maksimum (du) yakin 2,4137. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.

Karena ada 3 variabel pada model kedua (K = 3), maka nilai du (batas atas) yaitu 2,0163. Nilai DW 2,175 lebih kecil dari (4 - du) 4 - 2,0163 = 1,9837 dan melebihi batas atas (du) 2,0163. Tidak adanya autokorelasi dapat dikatakan dalam hal ini.

Hasil Uji Hipotesis



Tabel 4. Uji T

Variabel	Unstandardized Beta	Std. Error	t-count	P-Value	Keterangan
alokasi belanja modal → Kemiskinan	.109	.079	2.378	.023	Berpengaruh positif -signifikan
desentralisasi fiscal → Kemiskinan	.211	.250	2.844	.044	Berpengaruh positif -signifikan
Kinerja Kuangan Daerah→ Kemiskinan	-.002	.019	-2.124	.906	Tidak Berpengaruh
Indeks Pembangunan Manusia→ Kemiskinan	-.914	.227	-4.019	.010	Tidak Berpengaruh negatif - tidak signifikan
alokasi belanja modal → Indeks Pembangunan Manusia	.171	.124	1.388	.214	Tidak Berpengaruh
desentralisasi fiscal → Indeks Pembangunan Manusia	.982	.200	4.915	.003	Berpengaruh positif -signifikan
Kinerja Kuangan Daerah→ Indeks Pembangunan Manusia	-.067	.020	-3.393	.015	Berpengaruh negatif -signifikan
Alokasi belanja modal → Indeks Pembangunan Manusia→ Kemiskinan			-1.305	0.192	Tidak Mampu memdiasi
desentralisasi fiscal → Indeks Pembangunan Manusia→ Kemiskinan			-3.113	0.002	Tidak Mampu memdiasi
Kinerja Kuangan Daerah→ Indeks Pembangunan Manusia→ Kemiskinan			2.575	0.010	Mampu memdiasi

Pengaruh Alokasi belanja modal terhadap kemiskinan

Variabel alokasi belanja modal mempunyai nilai signifikansi (Sig.) pada tabel Coefficientsa sebesar 0,023 dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 dapat diartikan 0,023 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,844 > 1,65300. Ini menyiratkan bahwa kemiskinan secara signifikan dipengaruhi oleh bagaimana belanja modal dialokasikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2019), yang mengklaim bahwa nilai ini sesuai dengan teori bahwa jika belanja modal tumbuh, kemiskinan di kabupaten/kota akan berkurang.

Pengaruh Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan

Pada tabel Coefficientsa variabel pertumbuhan perusahaan mempunyai nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,044 dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 menunjukan 0,044 < 0,05, dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu -4,291 < 1.65300. Dengan demikian, desentralisasi fiskal secara signifikan mempengaruhi kemiskinan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pantas, Kindangen, & Rotinsulu, (2019) menyatakan Desentralisasi fiscal berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan

Variabel kinerja keuangan daerah mempunyai nilai signifikansi (Sig.) pada tabel Koefisien sebesar 0,906 dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 yang berarti 0,9060,05 dan nilai t hitung lebih rendah dari t tabel yaitu -2,1241. 65300. Dengan arti, kemiskinan tidak banyak dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan

Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ialah -4,019 1,65300, dan variabel indeks pembangunan manusia mempunyai nilai signifikansi (Sig.) senilai 0,010 pada tabel Coefficientsa dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 menunjukkan 0,010 < 0,05. Dengan kata lain, indeks pembangunan manusia secara signifikan memperburuk kemiskinan.

Pengaruh Alokasi belanja modal terhadap Indeks pembangunan manusia

Variabel alokasi belanja modal mempunyai nilai signifikansi (Sig.) pada tabel Coefficientsa sebesar 0,214 dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 yang berarti 0,214 > 0,05, dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ialah 1.388 < 1.65300. Dengan

demikian, indeks pembangunan manusia tidak terpengaruh oleh distribusi belanja modal.

Pengaruh Desentralisasi fiscal terhadap Indeks pembangunan manusia

Variabel desentralisasi fiskal mempunyai nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,003 pada tabel Coefficientsa dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 dapat diartikan 0,003 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,915 < 1,65300. Dengan demikian, indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara signifikan oleh desentralisasi fiskal.

Pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap Indeks pembangunan manusia

Variabel kinerja keuangan daerah mempunyai nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,015 pada tabel Koefisien dan nilai (derajat signifikansi) 0,05 artinya 0,015 < 0,05, dan nilai t hitung lebih rendah dari t tabel yaitu -3.393 < 1.65300. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara signifikan negatif oleh kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Hubungan tidak langsung antara Alokasi belanja modal terhadap kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia

Variabel Indeks pembangunan manusia terdapat nilai sobel senilai -1,305 atau -1,305< 1.65300. Artinya Indeks pembangunan manusia tidak mampu mediasi hubungan atara Alokasi belanja modal terhadap kemiskinan.

Pengaruh Hubungan tidak langsung anatara Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia

Variabel Indeks pembangunan manusia mempunyai nilai sobel sebesar -3,113 atau -3,113< 1.65300. Artinya Indeks pembangunan manusia tidak mampu mediasi hubungan atara Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan.

Pengaruh Hubungan tidak langsung anatara Kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia

Variabel Indeks pembangunan manusia mempunyai nilai sobel senilai 2,575 atau 2,575< 1.65300. Artinya Indeks pembangunan manusia mampu mediasi hubungan atara Kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Menindaklanjuti temuan-temuan kajian dari penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas, maka dari itu dimungkinkan untuk membuat beberapa objek yang berguna sebagai rekomendasi kebijakan sebagai berikut.

1) Alokasi belanja modal Kabupaten sragen menunjukan hubungan positf siginifikan, artinya apabila belanja modal naik maka akan menurunkan kemiskinan. Hal tersebut menunjukan bahwa alokasi belanja modal bisa menjadi strategi pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun agar anggaran belanja modal dapat dimanfaatkan lebih efisien, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyusunnya dalam APBD. Pemanfaatan belanja modal itu diharapkan mengedepankan pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan perbaikan akses jalan antar desa pinggiran, irigasi pertanian dan penyediaan air bersih, serta sektor-sektor lain yang berpengaruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan (pro-poor).
2) Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan memiliki hubungan positf siginifikan yang artinya desentralisasi fiskal bisa meningkatkan perolehan perkapita daerah, akibatnya mengurangi populasi orang miskin, sedangkan perolehan perkapita yang rendah akan berdampak sebaliknya. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membangun berbagai sektor di daerah ialah kesempatan yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemerataan pembangunan dan penanggulangan masyarakat yang tertinggal baik dari segi ekonomi maupun sosial pemerintah diharapkan selalu tanggap akan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang tepat sasaran demi kesejahteraan yang lebih baik.
3) Dalam hal kemandirian keuangan Kabupaten Sragen masih rendah dengan pola konsultatif, dimana keterlibatan pemerintah pusat mulai berkurang karena persepsi bahwa daerah secara marginal lebih mampu melakukan otonomi, untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan perlu diambil kebijakan optimalisasi penerimaan daerah (PAD) dari pemanfaatan sumber daya. Dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa menghambat

perekonomian daerah, momentum pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait HKPD sebagai kerangka hukum baru desentralisasi fiskal, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, harus dimaksimalkan.

4) Indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan tidak memiliki hubungan negative tidak signifikan, yang artinya saat ini indeks pembangunan manusia sekarang tidak mempunyai pengaruh signfikan terhadap kemisikian, namun untuk mengurangi angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat bekerja untuk meningkatkan penyampaian kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu dan ekonomi secara langsung. Hal ini akan meningkatkan standar semua sumber daya manusia, yang akan berkontribusi pada perbaikan output dan pendapatan. Oleh karena itu, jika pertumbuhan ekonomi mengikuti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat mengurangi populasi kemiskinan.

Referensi

Ali, W., Frynas, J. G., & Mahmood, Z. (2017). Determinants of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure in Developed and Developing Countries: A Literature Review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. https://doi.org/10.1002/csr.1410

Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*. https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3

Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara- Negara Asean. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan. https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.46953

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2019). Kabupaten Sragen Dalam Angka. *BPS Kabuapten Sragen*.

Daud, N., & Soleman, R. (2020). Effects of fiscal decentralization on economic growth and human development index in the Indonesian local governments. *Management Science Letters*. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.7.012

Dhrifi, A., Alnahdi, S., & Jaziri, R. (2021). The Causal Links Among Economic Growth, Education and Health: Evidence from Developed and Developing Countries. *Journal of the Knowledge Economy*. https://doi.org/10.1007/s13132-020-00678-6

Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. D. (2020). Fiscal decentralisation and inequality in Indonesia. *Economy of Region*. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24

Firdaus, & DKK. (2019). Aplikasi Metodologi Penelitian. *Cendikia*.

Frankenhuis, W. E., & Nettle, D. (2020). The Strengths of People in Poverty. *Current Directions in Psychological Science*. https://doi.org/10.1177/0963721419881154

Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *KINERJA*. https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483

Hasanuddin, R., Elpisah, E., & Muslim, M. (2021). The Influence of Financial Performance Dimensions on Local Government Capital Expenditure Allocation. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.956

Hayati, H., & Achsa, A. (2017). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.530

Juned, V., & Yusra. (2021). Using fuzzy C-means algorithm to cluster human development index. *Communications in Mathematical Biology and Neuroscience*. https://doi.org/10.28919/cmbn/5225

Kinasih, I. (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Apbd): Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Kabupaten Sragen).

Kwabena Obeng, S. (2021). Fiscal decentralization, democracy and government size: Disentangling the complexities. *Journal of International Development*. https://doi.org/10.1002/jid.3545

Leon-Castro, E., Blanco-Mesa, F., Romero-Serrano, A. M., & Velázquez-Cazares, M. (2021). The ordered weighted average human development index. *Axioms*. https://doi.org/10.3390/axioms10020087

Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Universitas Malikussaleh*.

Nugroho, R. (2019). Pengaruh Nilai Aset Tetap Dan Belanja Modal Dalam Alokasi Belanja Pemeliharaan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.370

Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the contexof fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16

Pantas, O. O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. https://doi.org/10.35794/jpekd.23452.20.01.2019

Prena, G. Das, & Muliyawan, I. G. I. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*. https://doi.org/10.22225/we.19.2.1955.131-142

Resce, G. (2021). Wealth-adjusted Human Development Index. *Journal of Cleaner Production*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128587

Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*. https://doi.org/10.23917/jep.v17i2.2082

Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries. *Financial Innovation*. https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7

Satria, M. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di PSTNT Batan Bandung. *Land Journal*. https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.708

Saud, I. M., Asterina, E., & Trisha, G. F. (2020). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Empirical Evidence from Regency/City Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*. https://doi.org/10.18196/jai.2102150

Septin, T. (2019). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam. *Keunggulan Bersaing Perusahaan Meningkatkan*.

Stryabkova, E. A., Vladyka, M. V., Lyshchikova, J. V., Rzayev, A. Y., & Kochergin, M. A. (2021). Smart specialization as a comprehensive territorial and sectoral approach to determining regional development priorities. *Journal of Environmental Management and Tourism*. https://doi.org/10.14505/jemt.v12.5(53).20

Suartini, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Inovasi*. https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230

Sutiono, F., & Syafitri, W. (2018). Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.75

Tawiah, V., Zakari, A., & Adedoyin, F. F. (2021). Determinants of green growth in developed and developing countries. *Environmental Science and Pollution Research*. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13429-0

Yumashev, A., Ślusarczyk, B., Kondrashev, S., & Mikhaylov, A. (2020). Global indicators of sustainable development: Evaluation of the influence of the human development index on consumption and quality of energy. *Energies*. https://doi.org/10.3390/en13112768